

Evaluasi Dampak PNPM Mandiri Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Oleh:

Anindya Caesara, Aufarul Marom, Ari Subowo

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Merapi Eruption is caused in environmental damage and crippled economical society. Basically, in a post-disaster condition, many people are needed of assistances or emergency responses. Therefore requires the disaster of management program, one of which is the Post Disaster PNPM. Post-Disaster PNPM is PNPM which focused specifically to deal with the Rural PNPM people location who hit by disasters. Rural PNPM is a national program which purposed in the policy framework form as basis and reference to the poverty implementation reduction programs based on society empowerment. This research aimed to give an explanation about the social impact of Post-Disaster PNPM implementation and to respond society to the Post-Disaster PNPM itself in Manisrenggo. This research has been designed and analyzed descriptive qualitatively. The collecting data has been done by literary study, observationally and interview with the number of informants deeply. Fortunately, it concluded that Merapi Eruption Post-Disaster PNPM in Manisrenggo, Klaten is run well, especially in physical development (general-social infrastructure). The successfully of Post-Disaster PNPM has been seen by society involvement and participation, facilities and infrastructures utilization then also returning rate level and the collectability of loaning to Women's savings and activities (SPP). All physical development planned have been finished. However, in an effort to increase the people's economy is still considered less than optimally because due to the lack awareness of the public to join special training programs and SPP activities. Moreover, the delayed of SPP tuition payment fee is impacted in a village as the PNPM will not provide funds for.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri

Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarasannya adalah masyarakat perdesaan. Pengalaman pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan telah menunjukkan bahwa konsep dalam program ini dapat dilakukan pada lokasi yang terkena dampak bencana alam, dengan beberapa penyesuaian yang tidak

bertentangan dengan prinsip dan tujuan program. PNPM Mandiri Pasca Bencana adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang difokuskan secara khusus untuk menangani masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilanda bencana. Pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan selanjutnya berturut-turut hingga awal November 2010. Bencana yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 ini sangat dahsyat. Dampak letusan Gunung Merapi ini telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar di wilayah yang tersebar di 4 (empat) kabupaten, yakni kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten. Lokasi yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Pascabencana di Klaten, Jawa Tengah ada di tiga kecamatan yaitu : Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko. Ketiga kecamatan itulah yang terkena dampak langsung dari bencana erupsi Merapi. Setiap kecamatan mendapatkan besaran bantuan dana BLM yang sama yaitu Rp. 5.500.000.000,-. Kerugian yang cukup fantastis dialami oleh masyarakat baik materiil maupun immateriil. Hal ini tidak semata-mata lantaran banyak sarana prasarana fisik yang rusak, tetapi juga telah berdampak pada upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

PNPM Pasca bencana memberikan bantuan dana kepada Kecamatan Manisrenggo sebesar Rp. 5.500.000.000,-. Pemanfaat di kecamatan Manisrenggo ini merupakan yang paling banyak dibandingkan dengan kedua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Karangnongko. Jumlah pemanfaat di Kecamatan Manisrenggo yakni Laki-laki 12.830 orang, Perempuan 15.727 orang dan RTM (Rumah Tangga Miskin) 20.004 orang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis mengambil fokus penelitian pada Kecamatan Manisrenggo berdasarkan jumlah pemanfaat pada Kecamatan Manisrenggo merupakan yang tertinggi diantara kedua kecamatan lainnya. Melihat hal tersebut, penulis mengambil judul

permasalahan **“EVALUASI DAMPAK PNPM MANDIRI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah evaluasi PNPM Pasca Bencana terhadap penanganan penanggulangan bencana Erupsi Merapi di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah dampak sosial (individu, organisasional, masyarakat dan lembaga atau sistem sosial) dari adanya PNPM Mandiri Pasca Bencana Erupsi Merapi dalam memulihkan sosial-ekonomi masyarakat korban erupsi Merapi di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah respon masyarakat korban erupsi Merapi dari adanya PNPM Mandiri Pasca Bencana di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis evaluasi PNPM Pasca Bencana terhadap penanganan penanggulangan bencana Erupsi Merapi di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah?
2. Untuk menganalisis dampak sosial (individu, organisasional, masyarakat, lembaga atau sistem sosial) dari adanya PNPM Mandiri Pasca Bencana Erupsi Merapi dalam memulihkan sosial-ekonomi masyarakat korban erupsi Merapi di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis respon masyarakat korban erupsi Merapi dari adanya dari PNPM Mandiri Pasca Bencana di Kecamatan

Manisrenggo Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan kemajuan Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai evaluasi dampak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Bagi kepentingan PNPM Mandiri Perdesaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sekaligus sumbang saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pasca Bencana Merapi di Klaten untuk kedepannya agar kinerjanya dapat lebih baik lagi.
- 1.4.2.2. Bagi kepentingan peneliti, merupakan sarana menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian ilmiah serta dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami fenomena dan masalah yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik. Selain itu juga sebagai salah satu syarat utama dari mata kuliah Metode Penelitian Administrasi.
- 1.4.2.3. Bagi kepentingan masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai teori-teori admisnistrasi publik, khususnya teori tentang studi Evaluasi dampak dan pengetahuan mengenai PNPM Mandiri Pasca Bencana.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Evaluasi Dampak

Di dalam buku Evaluasi Kebijakan Publik karangan Samodra Wibawa, kaitannya dengan dampak, vvaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya.

1.5.1.1. Karakteristik Analisis Dampak Sosial

ADS sebagai kerja intelektual harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sah. ADS haruslah dilakukan secara logika-empiris. Penilaian yang kita lakukan tidak boleh hanya bersifat spekulatif-hipotetik, melainkan mesti diuji atau dikuatkan dengan data.

1.5.1.2. Langkah-Langkah Analisis Dampak Sosial (ADS)

Langkah-langkah ADS yaitu, langkah pertama, mengembangkan file input ADS. Langkah kedua, pendeskripsian dampak sosial dari kebijakan tersebut. Langkah ketiga, menentukan respon individu maupun kelompok yang menjadi unit dampak. Langkah empat, penyesuaian kebijakan. Dan langkah yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Tujuan akhir dari suatu evaluasi kebijakan adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakannya.

1.5.1.3. Unit Sosial Pendampak

- a. Dampak individual
Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek psikis, lingkungan, ekonomi dan sosial serta personal.
- b. Dampak organisasional
Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara

langsung maupun tidak. Dampak yang langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya.

- c. Dampak terhadap masyarakat
Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menuju pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai input yang menyediakan sumber daya tapi sekaligus menampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan output.
- d. Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial
Perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial merupakan akibat dari sebuah kebijakan. Beberapa indikator untuk melihat apakah suatu sistem sosial itu lemah, sebagai berikut: (1) distribusi yang tidak merata, (2) persediaan sumber daya yang dianggap kurang, (3) adaptasi yang lemah, (4) koordinasi yang jelek, (5) turunnya kepercayaan.
- e. Respon terhadap dampak kebijakan
Respon terhadap kebijakan yang ditetapkan beragam, seperti skeptis, kritis dan analitis.

1.6. Operasional Konsep

Tahapan PNPM Mandiri Pasca Bencana :

1. Kegiatan Persiapan Pemulihan (Pra-Rehabilitasi)

- a. Kegiatan-kegiatan untuk pembersihan puing

- b. Penataan Lokasi (Sarana dan Prasarana)
- c. Memfungsikan kembali (Sarana dan Prasarana)

2. Kegiatan Rehabilitasi

- a. Peningkatan Kualitas Hidup (PKH)
- b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial dan Umum (Pembangunan Fisik)
- c. Simpan Pinjam khusus bagi Kelompok Perempuan (SPP)

Indikator Keberhasilan PNPM Pasca Bencana :

1. Peningkatan Kualitas Hidup (PKH)
 - a. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat
 - b. Pemanfaatan prasarana pendidikan dan kesehatan
2. Pembangunan Fisik (Sarana dan Prasarana Umum-Sosial)
 - a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana umum
3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
 - a. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat
 - b. Tingkat pengembalian pinjaman
 - c. Tingkat kolektibilitas pinjaman

Unit Sosial Pendampak :

- a. Dampak individual
- b. Dampak organisasional
- c. Dampak terhadap masyarakat
- d. Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial
- e. Respon terhadap dampak kebijakan

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian jenis deskriptif yaitu, suatu penelitian yang bermaksud mendapatkan gambaran tentang sifat dari suatu gejala masyarakat. Penelitian ini bertujuan melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial,

menggambarkan suatu gejala sosial tertentu.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokus penelitian di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Manisrenggo merupakan salah satu kecamatan yang terkena dampak langsung dari Letusan Merapi dengan jumlah pemanfaat tertinggi diantara dua kecamatan lainnya.

1.7.3 Subjek Penelitian

1. Badan Perberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Kepala Subid. Sosial Budaya)
2. PNPM Perdesaan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Ketua UPK)
3. Perangkat Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
4. Masyarakat Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

1.7.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya.

1.7.5 Sumber Data

1. Data primer, PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dan Masyarakat setempat.
2. Data sekunder, dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti data yang diberikan dari pihak Bapermas Kabupaten Klaten dan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Interpretasi data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi).

1.7.8 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2007: 121-125) dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data dilakukan beberapa teknik yaitu perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Klaten adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Klaten memiliki luas daerah 655,56 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.121.000 jiwa (2003) dengan kepadatan penduduk 1.709,99 per km². Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 665,56 km². Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali. Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas 53 desa dan 103 kelurahan. Ibukota kabupaten ini berada di Kota Klaten, yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kecamatan Manisrenggo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Manisrenggo memiliki luas daerah 26,96 km² dan jumlah penduduk sebanyak 35.735 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.325 per km². Kecamatan Manisrenggo merupakan salah satu wilayah

Kabupaten Klaten yang terletak di sebelah Barat Laut sesuai peta daerah Kabupaten Klaten yaitu dengan batas wilayah sebelah Utara Kecamatan Kemalang, sebelah Timur Kecamatan Karangnongko, sebelah Selatan Kecamatan Prambanan, dan sebelah Barat Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta).

1.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Klaten

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur penunjang dan pelaksanaan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat. **Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)** Badan Pemberdayaan Masyarakat yaitu membantu dan menunjang kelancaran tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Manisrenggo

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kabupaten perkecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kabupaten kategori bermasalah dalam PNPM-Mandiri Perdesaan. Kelompok Sasaran PNPM Perdesaan diantaranya, masyarakat miskin, kelembagaan masyarakat di perdesaan, dan kelembagaan pemerintah lokal. **Tujuan dari PNPM Perdesaan** adalah untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. **Tahapan kegiatan PNPM-Perdesaan** yaitu dimulai dari sosialisasi dan penyebaran informasi program, proses partisipatif pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan pemetaan sosial, perencanaan partisipatif di tingkat dusun dan desa, seleksi kegiatan di tingkat desa dan kecamatan, masyarakat melaksanakan kegiatan, akuntabilitas dan laporan perkembangan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan keberlanjutan

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Persiapan Pemulihan (Pra-Rehabilitasi)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah kegiatan yang bersifat Padat Karya yaitu kegiatan produktif yang banyak menyerap tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan penghasilan sementara bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin di wilayah yang terkena bencana erupsi Merapi dan telah kehilangan pekerjaan atau usahanya. Kegiatan padat karya ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembayaran upah kerja.

- a. **Kegiatan-kegiatan untuk pembersihan puing (*sites/lands clearing*)**, yaitu pembersihan pada kawasan permukiman agar supaya dapat dipergunakan kembali, seperti pembersihan lingkungan, endapan lumpur, batu-batuan, dan sampah yang berasal dari lumpur endapan abu vulkanik serta pembersihan sungai.
- a. **Penataan Lokasi**, ditujukan untuk pemulihan cepat sarana prasarana dan fasilitas umum-sosial yang rusak akibat bencana agar supaya dapat digunakan sampai dengan tahap rehabilitasi, yaitu jalan tertimbun longsor yang perlu dibersihkan dari tanah, batu-batuan dan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Selain itu, dilakukan perbaikan jaringan irigasi, perbaikan sarana air bersih dan

sarana persampahan/penampungan sampah sementara.

- b. **Memfungsikan kembali**, dimaksudkan agar sarana prasarana dan fasilitas umum-sosial yang rusak akibat dampak bencana diperbaiki sehingga dapat berfungsi secara minimal atau darurat untuk mendukung dimulainya kembali kehidupan sosial ekonomi dimasyarakat, yaitu dengan perbaikan jalan (cor beton) dan pembuatan Talud.

3.2. Tahapan Rehabilitasi

Tahapan ini menggunakan pendekatan yang sama dengan PNPM Perdesaan Reguler yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan dengan menggunakan kegiatan berbasis padat karya dan swakelola (diutamakan warga korban bencana memperoleh akses kerja pada kegiatan proyek) dengan tujuan memperkuat ikatan sosial (gotongroyong), sekaligus memberikan pendapatan kepada masyarakat. Selain itu, dengan tetap menyediakan alokasi dana maksimal 25% dari dana BLM yang dipergunakan masyarakat sebagai pinjaman bergulir untuk kelompok-kelompok perempuan (SPP).

Kegiatan PNPM Pasca Bencana :

- a. **Peningkatan Kualitas Hidup (PKH)**
Kegiatan-kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) di dalam PNPM Pasca Bencana di Kecamatan Manisrenggo yaitu pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat, pembangunan fasilitas kesehatan dan pembangunan gedung pendidikan diantaranya 8 pembangunan gedung PAUD dan 2 gedung Polindes.
- b. **Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial dan Umum (Pembangunan Fisik)**
Pembangunan Fisik (sarana prasarana) yang dilakukan adalah memperbaiki saluran irigasi, pembuatan talud, memperbaiki jalan, aspal jalan dan cor beton.
- c. **Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**
Dana Simpan Pinjam khusus bagi Kelompok Perempuan untuk kebutuhan

usaha rumah tangga, peralatan modal kerja, atau keperluan rumah tangga lainnya bagi para anggota kelompok yang sangat mendesak dengan alokasi maksimal 25% dari alokasi dana BLM per-kecamatan. Ada 14 desa yang mengikuti kegiatan SPP. Dana SPP ini bersifat pinjaman bergulir yang selanjutnya dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

3.3. Alur Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana

1. Sosialisasi Musyawarah Antar Desa mengenai kebijakan, pendanaan, jadwal kegiatan, jenis kegiatan dan penentuan tenaga kerja.
2. Melakukan Pelatihan Tim Kaji Data Kerusakan untuk mendata kerusakan yang terjadi.
3. Verifikasi lapangan, data kerusakan sekaligus identifikasi usulan kegiatan SPP
4. Musyawarah desa (review atau kajian)
5. MAD (review atau kajian)
6. RAB dan desain, usulan prioritas mulai dari ranking tertinggi dibuatkan desain dan RAB-nya. Hasil RAB bisa dituangkan dalam beberapa SP2D.
7. Musdes informasi kegiatan rehabilitasi
8. Pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan
9. Musdes pertanggungjawaban, melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan desa.
10. MAD pertanggungjawaban, melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan seluruh desa, serta evaluasi aturan main termasuk penerapan sanksi jika terjadi penyimpangan oleh desa partisipan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Evaluasi PNPM Pasca Bencana

Di dalam program padat karya, pengalokasian dana BLM untuk pembangunan fisik adalah sekitar 30% sedangkan 70% nya digunakan untuk pembayaran upah atau insentif. Hal ini dikarenakan tujuan dari program padat karya adalah memberikan pendapatan sementara kepada masyarakat. Di dalam kegiatan rehabilitasi, pengalokasian dana BLM lebih besar untuk pembangunan fisik (sarana dan prasarana) yaitu sebesar 58,7%, 10% nya digunakan untuk kegiatan SPP dan 0,3% digunakan untuk kegiatan PKH.

4.2. Keberhasilan Kegiatan PNPM Pasca Bencana :

4.2.1. Peningkatan Kualitas Hidup (PKH)

4.2.1.1. Keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat

Semakin banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, maka semakin banyak juga masyarakat yang dapat disentuh oleh kegiatan dari PNPM Pasca Bencana ini. Adanya pelatihan khusus ini dapat memacu timbulnya kelompok-kelompok usaha baru yang nantinya akan dapat menunjang kegiatan SPP. Jika masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik hasil dari pelatihan ini, maka mereka dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri dan menghasilkan suatu usaha kecil.

4.2.1.2. Pemanfaatan Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Di dalam PKH kegiatan yang dilakukan melalui pembangunan gedung PAUD dan Polindes. Polindes ini ditujukan untuk menjadi sarana pendukung kesehatan, karena dapat

mempengaruhi kualitas dari SDM yang ada di desa tersebut. Sedangkan, pembangunan gedung PAUD ini ditujukan untuk menunjang pendidikan, khususnya bagi anak usia dini yang sebenarnya sangat membutuhkan pengajaran guna membentuk kreativitas dan melatih otak mereka serta mempersiapkan anak-anak tersebut pada jenjang sekolah berikutnya.

4.2.2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial dan Umum (Pembangunan Fisik)

4.2.2.1. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat di tahapan perencanaan sangatlah penting dan harus benar-benar dapat memutuskan secara bijak mengenai pembangunan apa yang akan dilakukan karena pembangunan ini nantinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka juga. Bagaimana masyarakat merencanakan suatu pembangunan fisik, penentuan anggaran sampai pada tahap pengambilan keputusan pembangunan apa yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan haruslah didasari dengan urgensi yang ada di masyarakat.

4.2.2.2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Umum

Kegiatan di dalam pembangunan fisik diantaranya adalah perbaikan jalan (aspal dan cor beton), pembuatan talud, dan perbaikan saluran irigasi. Dengan adanya pembangunan sarana-prasarana ini, membuat masyarakat dapat menjalani aktivitasnya atau pekerjaannya kembali, jalanan yang sudah diperbaiki dan persawahan yang

sudah dapat digunakan kembali. Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat guna menunjang kehidupannya.

4.2.3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

4.2.3.1. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat

Pada dasarnya kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan ini karena sanksi yang terlalu berat, jika kelompok masyarakat terlambat dalam membayar angsuran pinjaman maka yang terkena dampaknya satu desa yaitu dengan tidak diberikannya dana pembangunan fisik di periode tahun berikutnya. Hal ini lah yang menjadi gejala bagi masyarakat.

4.2.3.2. Tingkat Pengembalian Pinjaman

Untuk tunggakan pinjaman SPP sebesar Rp.149.633.500 dengan alokasi pinjaman sebesar Rp. 2.671.806.725, jadi tingkat pengembalian untuk kelompok SPP sebesar 94,4%. Melihat data tersebut, tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi ini, dapat terjadi karena adanya komitmen masyarakat untuk dapat mencapai tujuan kelompoknya dengan memanfaatkan dana pinjaman tersebut benar-benar untuk kepentingan pengembangan usaha kelompok mereka.

4.2.3.3. Tingkat Kolektibilitas Pinjaman

Ada 11 kelompok-kelompok usaha masyarakat yang menunggak atau terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran dari SPP. Berdasarkan tersebut, jumlah penunggak pinjaman SPP masih dapat dikatakan jumlah yang banyak karena jika melihat pada sanksi keterlambatan pembayaran angsuran yang

dampaknya sampai pada desa maka satu kelompok saja yang mengalami keterlambatan sangat dapat merugikan kesejahteraan masyarakat lainnya yang berada di desa tersebut.

4.3. Unit Sosial Pendampak di dalam PNPM Pasca Bencana :

a. Dampak individual

- **Dampak psikis**

Erupsi Merapi menyebabkan trauma yang berkepanjangan terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan kondisi psikis masyarakat menjadi terganggu. Dalam hal ini, PNPM Pasca Bencana tidak melakukan kegiatan apapun dalam rangka pemulihan kondisi psikis masyarakat pasca bencana yang terjadi, PNPM Pasca Bencana hanya berfokus pada pembangunan fisik serta pendapatan masyarakat, namun melupakan hal vital ini.

- **Dampak terhadap lingkungan**

Di dalam pelaksanaan PNPM Pasca Bencana dilakukan kegiatan-kegiatan pembersihan puing-puing dan jalan serta perbaikan-perbaikan sarana prasarana umum-sosial (perbaikan jalan, pembuatan talud dan pembuatan saluran irigasi) yang dapat mengembalikan lingkungan sekitar menjadi dapat difungsikan kembali dan membuat masyarakat dapat beraktivitas kembali.

- **Di dalam bidang ekonomi**

Di dalam hal ini, PNPM Pasca Bencana memberikan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Di tahapan awal yaitu tahapan pra-rehabilitasi (padat karya) memberikan pendapatan sementara atau jangka pendek kepada masyarakat dengan cara mempekerjakan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di tahapan pra-rehabilitasi

tersebut. Selain itu, pada tahapan rehabilitasi, adanya kegiatan simpan pinjam bergulir yaitu SPP yang ditujukan untuk menambah modal usaha masyarakat.

b. Dampak terhadap masyarakat

Semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan atas usulan-usulan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing desa. PNPM Pasca Bencana, dalam hal ini juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan cara memberdayakan mereka sebagai pekerja. Kegiatan padat karya memberikan pendapatan jangka pendek atau sementara kepada masyarakat pasca erupsi Merapi. Pembangunan fisik di dalam kegiatan rehabilitasi membantu memulihkan keadaan sosial atau lingkungan masyarakat terutama di bidang sarana-prasarana.

c. Dampak organisasional

SPP ini dijadikan sebagai modal usaha yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha mereka dan dapat menambah pendapatan mereka. Dana bantuan SPP membantu tercapainya tujuan dari kelompok-kelompok usaha masyarakat tersebut dengan cara mengembangkan usaha mereka agar kinerja dan produktivitas kelompok usaha mereka dan hal ini juga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Namun, pada kenyataannya, masih ada kelompok-kelompok yang menggunakan modal SPP untuk kepentingan pribadi atau bersifat konsumtif.

d. Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial

Adanya transparansi terhadap besaran dana BLM yang diberikan dan juga rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam PNPM Pasca Bencana membuat masyarakat percaya akan kinerja dari PNPM Pasca Bencana dalam mensejahterakan

kehidupan mereka. Pendistribusian dana BLM ini dilakukan berdasarkan kebutuhan di masing-masing desa yang disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi. PNPM Pasca Bencana ini melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat sehingga koordinasi antara keduanya terjalin dengan baik. Sedangkan koordinasi antara Tim Pelaksana PNPM dengan perangkat desa sebagai penanggung jawab atas kegiatan yang ada di desa kurang terjalin dengan baik karena PNPM seringkali tidak melapor terlebih dahulu di dalam setiap kegiatan yang dilakukan di desa.

e. Respon terhadap PNPM Pasca bencana

Adanya dampak positif dari PNPM Pasca Bencana yaitu lingkungan yang dapat dipergunakan kembali, bertambahnya rasa kebersamaan, dan bertambahnya pengetahuan serta kreativitas masyarakat. Masih kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan membuat pelatihan ini menjadi tidak optimal karena tidak dapat menyentuh semua masyarakat. Selain itu banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa sanksi yang diberikan terlalu berat jika para kelompok masyarakat terlambat untuk melunasi SPP. Sanksi jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran adalah dengan tidak memberikan SPP untuk tahun berikutnya kepada desa yang terkena masalah.

4.4. Rekomendasi Kebijakan (Policy Recommendations)

PNPM Pasca Bencana hanya dilakukan selama 2 tahun yaitu dari tahun 2011-2012. Melihat permasalahan yang telah dipaparkan, setelah PNPM Pasca Bencana ini telah selesai dilakukan haruslah ada kegiatan lanjutan. Oleh karena itu, PNPM Pasca Bencana dapat diteruskan pada kegiatan dari PNPM

Perdesaan Reguler. Berikut ini merupakan rekomendasi terhadap revisi PNPM Pasca Bencana :

1. Penanganan Pinjaman Bermasalah

Dalam penanganan pinjaman SPP bermasalah dilakukan dengan membentuk suatu Tim khusus untuk mengatasi keterlambatan angsuran ini. Peran dari Tim yang dibuat ini adalah untuk melakukan pendataan setiap kelompok yang mengajukan proposal kegiatan SPP, di dalam hal ini tim tersebut memverifikasi keadaan perekonomian dan mempelajari proposal yang diajukan. Selain itu, tim tersebut juga melakukan pemantauan kepada setiap kelompok yang mengajukan pinjaman.

2. Pelatihan dan Sosialisasi kepada Kelompok masyarakat

Perlu diadakan sosialisasi akan manfaat dari modal SPP untuk mengembangkan atau meningkatkan produktivitas suatu usaha. Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan administrasi, pelatihan manajemen, pelatihan strategi pemasaran, dan pelatihan wirausaha. Dalam rangka mempromosikan hasil produksi masyarakat, dapat dilakukan pameran ataupun bazaar yang diisi dengan usaha-usaha rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk lokal yang dibuat masyarakat.

3. Kegiatan SPP tidak menyentuh masyarakat miskin

Hal yang harus dirubah di dalam kegiatan SPP ini adalah pertama, skema pembayaran angsuran harus disesuaikan dengan penghasilan dari masyarakat kelas bawah (seperti petani). Dalam artian, pihak UPK dan masyarakat peminjam modal pertama-tama merancang dulu skema pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, jadi dibuat perhitungan antara jumlah modal yang dipinjamkan dengan periode pembayaran angsuran. Kedua,

perihal sanksi jika terlambat membayar angsuran pinjaman SPP akan lebih baik jika lebih dilonggarkan. Dalam artian, lebih berpaku pada peran PNPM sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB IV PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan PNPM Pasca Bencana masyarakat menerima dengan baik kegiatan yang dilakukan dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap kegiatan. Berikut ini adalah Unit Sosial pendampak dalam PNPM Pasca Bencana :

a. **Dampak Individual**

Aspek Psikis, belum adanya kegiatan untuk mengurangi trauma (kondisi psikis) masyarakat akibat erupsi Merapi. **Aspek Lingkungan**, adanya kegiatan pembersihan puing-puing serta pembangunan sarana-prasarana umum guna mengembalikan lingkungan setempat dapat dipergunakan. **Aspek Ekonomi**, memberikan pendapatan sementara atau jangka pendek kepada masyarakat sebagai pekerja melalui pembayaran upah atau insentif. Selain itu, adanya SPP guna menambah modal usaha masyarakat.

b. **Dampak terhadap Masyarakat**, kegiatan padat karya memberikan pendapatan jangka pendek pasca erupsi merapi kepada masyarakat. Pembangunan fisik di dalam kegiatan rehabilitasi membantu memulihkan keadaan sosial masyarakat terutama di bidang sarana-prasarana.

c. **Dampak Organisasional**, adanya SPP yang digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat sebagai modal usaha guna menunjang usaha mereka. Namun, pada

nyatanya, masih ada sebagian kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menggunakan modal SPP seperti seharusnya atau bersifat konsumtif.

d. Dampak terhadap Lembaga atau Sistem Sosial, koordinasi masyarakat dengan pihak PNPM Perdesaan terjalin dengan baik, namun koordinasi PNPM dengan perangkat desa dinilai masih kurang terjalin dengan baik akibat kurangnya komunikasi antara keduanya.

e. Respon terhadap masyarakat, masyarakat menerima dengan baik kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh PNPM Pasca Bencana. Namun, dalam kegiatan SPP, sebagian masyarakat masih ada yang keberatan dengan sanksi yang diberikan untuk keterlambatan pembayaran SPP.

5.2. Saran

5.2.1. Membentuk tim khusus guna mengurus kelompok usaha masyarakat dengan melakukan pendataan, memverifikasi keadaan perekonomian dan melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok usaha tersebut.

5.2.2. Adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran SPP, perlu dilakukannya upaya sosialisasi penggunaan anggaran SPP di tingkat rumah tangga sehingga adanya pemahaman di kalangan masyarakat bahwa modal yang diberikan akan bermanfaat jika dipergunakan untuk peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

5.2.3. Perlu disesuaikan skema pembayaran angsuran dengan penghasilan dari masyarakat kelas bawah (seperti petani). Pihak UPK dan masyarakat peminjam modal pertama-tama merancang dulu skema pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R, 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Gava Media.
- Lester, James P., & Joseph Stewart Jr., 2000, *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Belmont: Wadsworth.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lexy J Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Karsidi, Asep. 2008. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pasca Bencana*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Hadiwinoto, Suhandi, & Catrini P.K. 2011. *Selalu Ada Semangat dan Jalan (Padat Karya Pemulihan Pasca Bencana Merapi PNPM Mandiri)*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan PNPM Support Facility (PSF).